

INTEGRASI EKONOMI DAN KESIAPAN INDONESIA DALAM PELAKSANAAN ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY 2015*

Yulia Sariwaty S

Universitas BSI

Jalan Sekolah Internasional No. 1-6 Antapani, Bandung 40282

yulia.sariwaty@yahoo.com

Abstract - Globalization of economic contemporer can be happen cause some factors influences, that factors are advance on technology information and transportation, trade pattern, capital movement, market financial, and human migration. ASEAN is South East Asia region organization. From the beginning, ASEAN have been purpose to economic, social and cultural cooperation. Globalization of economic is a situation can't be avoidable on this century, and Asean Economic Community is realization of integration economic. Purpose of Asean Economic community 2015 to be ASEAN as single market and based production of commodity, service, professional labor, where investment and capital current flow of free to region, including global trade and economic activities.

Keyword : Globalization of economic, ASEAN

Abstrak - Terjadinya globalisasi ekonomi kontemporer diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi informasi dan transportasi, pola perdagangan, pergerakan modal, pasar keuangan, dan migrasi manusia. ASEAN merupakan organisasi kawasan di Asia Tenggara. Dari awal, pembentukan ASEAN bertujuan untuk kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi ekonomi merupakan situasi yang tidak bisa dihindari pada abad ini, dan masyarakat ekonomi ASEAN adalah realisasi dari kegiatan integrasi ekonomi tersebut. Tujuan dari pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi komoditi, jasa, sumber daya profesional, dimana arus modal dan investasi mengalir bebas ke kawasan, termasuk aktivitas perdagangan dan ekonomi dunia.

Kata Kunci : Globalisasi Ekonomi, ASEAN

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi secara *integrated* bukanlah sebuah fenomena baru, karena keberlangsungannya telah ada sejak zaman sebelum masehi. Orang-orang Mesir Kuno sudah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa antar benua, begitu pula dengan orang-orang Yunani, Babilonia, Sumeria, Cina, bahkan bangsa Eropa. Meskipun artikulasi, pendekatan dan paradigma mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan yang berlangsung pada saat itu berbeda-beda. Runtuhnya kekuasaan Romawi pada periode Perang Dunia I dan II menyebabkan terbentuknya pola integrasi ekonomi yang terstruktur bagi masyarakat dunia, proses globalisasi dalam domain ekonomi pun mengalami percepatan tanpa pernah diduga sebelumnya.

Arus globalisasi yang sedang berlangsung merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dibendung, bahkan sebuah negara tidak akan pernah bisa sepenuhnya menutup diri terhadap proses globalisasi. Ada beberapa faktor fundamental yang memiliki peranan kunci dalam mempengaruhi terjadinya globalisasi ekonomi, faktor-faktor tersebut meliputi kemajuan teknologi informasi dan transportasi, pola perdagangan, pergerakan modal dan pasar keuangan, serta migrasi manusia.

KAJIAN LITERATUR

Association South of East Asia Nations (ASEAN) dan Integrasi Ekonomi Kawasan

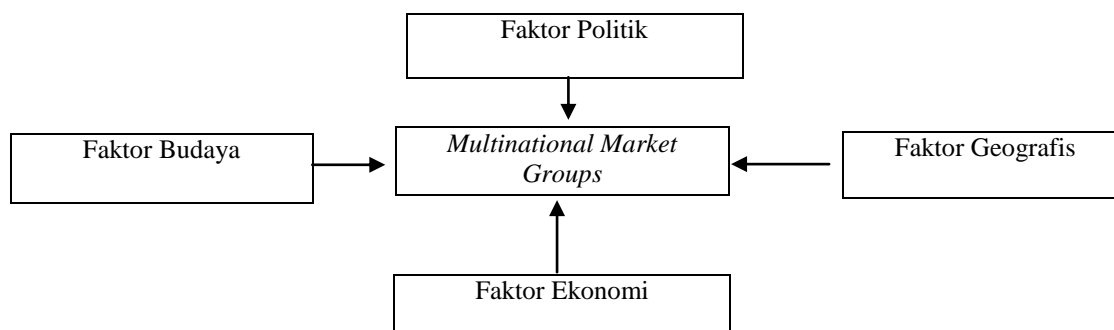
Pada 8 Agustus 1967, lima tokoh negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Philipina

menandatangani kesepakatan dibentuknya *Association South of East Asia Nations (ASEAN)* pada Deklarasi Bangkok tahun 1967, sebagai upaya dimulainya kerjasama ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh anggotanya. Pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara ASEAN. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggota ASEAN selanjutnya bertambah dengan bergabungnya negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama dalam bidang ekonomi berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang sosial, budaya, politik dan keamanan. Keadaan tersebut mendorong ASEAN untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Negara-negara anggota ASEAN menjadikan integrasi ekonomi kawasan dianggap sebagai langkah penting bagi

pencapaian *ASEAN Economic Community (AEC)* guna meningkatkan daya saing dalam ekonomi tingkat global. *ASEAN Economic Community (AEC)* merupakan salah satu bentuk *Free Trade Area*.

Sejarah menunjukkan, jika pada awalnya niat pembentukan ASEAN didasari untuk menumbuhkan kerjasama regional yang kooperatif dalam upaya meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya antar negara dikawasan. Sejak awal terbentuk, secara bertahap ASEAN telah menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Adapun kesepakatan yang dianggap menjadi peluang dasar pembentukan *ASEAN Economic Community (AEC)* tahun 2015 adalah disepakatinya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan melahirkan *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* pada tahun 1992 dengan target implelementasi semula pada tahun 2008, yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.



Gambar 1
Faktor Pembentukan Kerjasama Ekonomi Regional

PEMBAHASAN

Disepakatinya *ASEAN Vision 2020* pada tahun 1997, bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi melalui pembangunan ekonomi yang merata, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pemberlakuan *AFTA* bisa dikatakan sebagai anti klimaks dari globalisasi, terlebih krisis ekonomi Asia menimpa hampir seluruh negara-negara anggota ASEAN, oleh sebab itu *AFTA concern* pada penurunan hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota ASEAN tujuannya untuk membantu *economic recovery* dan meningkatkan *bargaining position* ditingkat global. Selanjutnya

pada tahun 2003, kembali disepakati tiga poin penting untuk mempercepat pelaksanaan *ASEAN Vision 2020* menjadi tahun 2015, poin-poin tersebut meliputi:

1. *ASEAN Economic Community*,
2. *ASEAN Political-Security Community*,
3. *ASEAN Socio-Cultural Community*

Januari 2007, rencana untuk mempercepat pelaksanaan *ASEAN Economic Community (AEC) 2020* menjadi tahun 2015 kembali disepakati. Di tahun yang sama, ditandatangani pula *AEC Blueprint* sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, dimana setiap negara-negara anggota ASEAN

berkewajiban untuk berkomitmen terhadap isian yang tertuang didalam *blueprint* tersebut. *AEC Blueprint* terdiri dari rencana-rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yang terdiri dari:

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Untuk pelaksanaannya, rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* dan setiap upaya pencapaiannya akan dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card*. Guna mewujudkan seluruh rencana tersebut, tentunya diperlukan adanya daya dukung berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, peningkatan konsultasi antara pihak pemerintah dan sektor swasta, termasuk program pengembangan sumber daya manusia, serta kegiatan pengembangan dan penelitian di masing-masing negara anggota.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint selanjutnya disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. *AEC Blueprint* bertujuan menjadikan kawasan ASEAN agar lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, serta memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan terwujudnya kesetaraan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas,

AEC Blueprint merupakan suatu *master plan* bagi ASEAN.

Terkait dengan implementasi dari *AEC Blueprint*, maka pada tahun 2007-2008, Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi *AEC Blueprint* bersamaan dengan sosialisasi *ASEAN Charter*, khususnya kepada asosiasi-asosiasi bisnis baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, *workshop*, lokakarya maupun Kuliah Umum, dan diskusi diberbagai lembaga maupun media. Salah satu target sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi tersebut adalah untuk memicu kesiapan seluruh elemen masyarakat dalam menumbuhkan *ASEAN public awareness*, meskipun pada prakteknya sosialisasi tersebut baru bisa dipahami oleh kalangan menengah keatas saja.

Tantangan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)

Indonesia memiliki tantangan besar dalam menghadapi pemberlakuan perdagangan bebas, tidak hanya permasalahan domestik, tetapi dari lingkup internasional khususnya kawasan Asia Tenggara. Jika berbicara tentang peta kemakmuran, dari sepuluh Negara anggota ASEAN maka sudah pasti Singapura dan Malaysia merupakan negara yang telah dianggap mapan secara ekonomi dikawasan, sedangkan Indonesia belum bisa dikategorikan sama karena secara ekonomi Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri dan masuknya investor dari negara maju.

Data ekspor akhir tahun 2008 menunjukkan, jika Indonesia berada pada peringkat ke-4 di kawasan ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand padahal Indonesia merupakan Negara penghasil bahan baku. Jika kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan akan mengalami defisit yang akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.

Kelemahan lainnya yang nyata didepan mata adalah permasalahan *migrant worker*, Indonesia sebagai produsen tenaga kerja *migrant* terbesar menghadapi segudang permasalahan dalam hal sumber daya manusianya yang bekerja diluar negeri, permasalahan tersebut meliputi tenaga kerja illegal, ketidakmampuan dalam hal bahasa, keterbatasan keterampilan, dan lain sebagainya.

Strategi Indonesia dalam Pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang *Heterogen* dengan berbagai suku, bahasa dan adat istiadat. Indonesia memiliki kekuatan sumber daya ekonomi yang cukup bagus jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan tentu akan menjadi modal yang sangat penting untuk menuju ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015. Idealnya, pemberlakuan pasar bebas dikawasan ASEAN pada tahun 2015, membuka peluang bagi Indonesia dalam membuka dan membentuk pasar yang lebih luas lagi. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 akan membentuk pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Indonesia juga mempunyai berbagai komoditi ekspor andalan dunia, seperti minyak kelapa sawit, minyak mentah, produk tekstil, produk hasil hutan, kopi, coklat, ikan dan udang, timah, batubara, karet, emas, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat, produk kulit, dan masih banyak lagi komoditi andalan lainnya.

Dengan tarif yang hampir 80% menggunakan *zero percent* tentunya akan mempermudah Indonesia memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak semua bahan baku ada di Indonesia, dan akan memicu persaingan yang lebih kompetitif baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Tentu saja peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur kebijakan iklim investasi agar tidak hanya mencari keuntungan di Indonesia, tetapi juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika pemerintah tidak melakukan kajian analisis dan strategi terhadap permasalahan tersebut, kemungkinan beberapa sektor industri akan melemah ketika FTA benar-benar diimplementasikan.

Dalam KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh tahun 2012, Indonesia ditunjuk sebagai *leader* dalam mengintegrasikan kekuatan Asia Tenggara ditingkat global. Bersama dengan Singapura dan Thailand, Indonesia berada di urutan terdepan dalam mengimplementasikan konsep-konsep yang telah disepakati. Kementerian Perdagangan RI optimis, jika pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Indonesia. Melalui konsep *Regional Comprehensive Economic*

Partnership (RCEP) diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar dalam perekonomian global bersaing dengan blok-blok integrasi lainnya di luar Asia. Tentunya peluang ini harus dimaksimalkan oleh seluruh negara ASEAN dengan persiapan di seluruh lini sektor.

Adapun strategi-strategi yang seharusnya dipersiapkan pemerintah agar mampu bersaing dalam pelaksanaan pasar bebas nanti adalah peningkatan ekspor-impor, jaminan stabilitas politik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, ketertiban sosial, kemampuan inovasi teknologi, serta ketersediaan infrastruktur dan standar kesejahteraan yang memadai. Dengan mempersiapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan pada tahun 2015 nanti, Indonesia akan benar-benar siap, apalagi Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Namun untuk mencapai semua itu, Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang handal memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga mampu meningkatkan pengelolaan produksi bahan baku.

Dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berpeluang menjadi penyedia tenaga kerja, namun tentunya dengan persiapan melalui peningkatan kualitas dan keterampilan (*Hard skill dan soft skill*) terlebih dahulu karena secara tidak langsung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing. Upaya peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan melalui pelatihan bahasa, penguasaan teknologi, pengembangan skill melalui pelatihan, *workshop*, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi untuk membangun *networking*.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemampuan pemberdayaan dalam sektor ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan iklim usaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar lokal dan nasional, tetapi juga ekspor. Semakin banyaknya UMKM yang bisa mengekspor barang-barang hasil produksinya, diharapkan akan membantu peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Penyediaan Modal oleh pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya,

dibutuhkan lembaga pemodal yang mudah diakses oleh para pelaku

Strategi yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti logistik, listrik, telekomunikasi, revitalisasi transportasi, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, kesemua faktor tersebut sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas karena tersendatnya pengiriman logistik dapat meningkatkan inflasi dan daya saing juga sangat ditentukan oleh cepat lambatnya distribusi barang.

Reformasi pada kelembagaan dan pemerintahan sangat diperlukan, karena sistem kelembagaan yang berlaku saat ini masih menjalankan birokrasi berkepanjangan dan mempersulit pengurusan administrasi. Penguatan lembaga hukum juga masih perlu dibenahi, terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum sehingga tercipta iklim kelembagaan hukum yang profesionalisme dan transparansi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan mencegah potensi korup diberbagai tingkat lembaga pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang pelaksanaannya direncanakan oleh *ASEAN* pada tahun 2015. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan *AEC 2015* adalah untuk menjadikan *ASEAN* sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi dimana arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil, serta aliran modal yang lebih bebas dalam kegiatan ekonomi kawasan dan global.

Keterlibatan semua pihak diseluruh negara anggota *ASEAN* mutlak diperlukan, untuk bisa mewujudkan *ASEAN* sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara-negara anggota *ASEAN*. Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi dan kepemilikan sumber daya alam terbesar seharusnya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam kegiatan *AEC 2015* nantinya.

Strategi dan persiapan harus disiapkan Indonesia secara optimal dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang akan diterapkan oleh *ASEAN*.

Seiring perkembangan waktu, diharapkan Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah akan mampu membawa pergerakannya ke arah yang lebih maju lagi, melalui pembuktian dengan meningkatnya pengakuan internasional terhadap eksistensi Indonesia dijalur positif.

Semoga saja, pada pelaksanaannya nanti pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang tepat terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang meringankan pengusaha dalam negeri serta sanksi tegas bila terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan oleh para investor negara lain, karena kebijakan dan sanksi merupakan intervensi pemerintah untuk tujuan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat.

Masyarakat Indonesia juga diharapkan mampu menyikapi pelaksanaan *AEC 2015* sebagai moment untuk melakukan pembenahan peningkatan kualitas *Human Development Index (HDI)*, karena dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan kita bisa mengikis stigma negatif Indonesia sebagai negara penghasil “pembantu” sehingga mampu meningkatkan *bargaining position* kita dengan *SDM* negara lainnya.

REFERENSI

- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gusmardi Bustami, *Menuju Asean Economic Community 2015*, Jakarta:DirJen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Indonesia.
- Sanchita Das Basu, *Achieving The ASEAN Economic Community 2015*.
- Triansyah Djani D., 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta:DirJen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- T. May Rudy, 2002, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi & Operasionalisasi*, Bandung:Refika Aditama.
- Yanuar Ikbar, 2006, *Ekonomi Politik Internasional*, Bandung:Refika Aditama.

<http://www.bps.go.id>
<http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id>
<http://www.kemenperin.go.id>
<http://www.imf.org>